

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tata kelola IT menggunakan framework COBIT sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain seperti yang dilaksanakan oleh Abu Musa (2009) yang menggunakan *framework* COBIT untuk mengevaluasi penggunaan sistem di Saudi Arabia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar responden melaporkan bahwa departemen TI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses COBIT dalam domain organisasi mereka. (Abu Musa, 2009).

Penelitian lainnya tentang COBIT juga dilakukan oleh Tanuwijaya dan Sarno (2010), dimana dari hasil penelitiannya mengusulkan penggunaan COBIT *maturity model* dan model persamaan struktural untuk mengukur keselarasan antara peraturan akademik universitas dan tujuan teknologi informasi.

Penelitian tentang audit sistem informasi menggunakan framework COBIT juga dilakukan oleh Purwanto dan Saufiah (2010), dimana tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan audit terhadap Bagian Pusat Pengolahan Data dengan tahapan menentukan *management awareness*, kemudian *plotting* terhadap COBIT 4.1 dan perhitungan maturity level serta memberikan masukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan, dengan cara analisis sistem informasi secara langsung pada Bagian Pusat Pengolahan Data berdasarkan COBIT 4.1.

Noerlina dan Cory (2008) juga melakukan penelitian tentang tata kelola teknologi informasi, dengan menggunakan *framework* COBIT, dengan studi kasus

di PT. Garuda Indonesia. Menurut Noerlina dan Cory (2010) panduan manajemen COBIT menyediakan *maturity model* yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai *maturity level* setiap proses IT dari status perusahaan sekarang dan masa mendatang. Selain itu COBIT juga menyediakan KPI (*Key Performance Indicator*) dan KGI (*Key Goal Indicator*). KGI menunjukkan apa yang telah dicapai oleh proses IT, sedangkan KPI menunjukkan seberapa baik proses IT telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Penelitian tentang penggunaan *framework* COBIT dalam dunia pendidikan, seperti dilakukan oleh Setiawan (2008), yang melakukan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi pada perguruan tinggi di Yogyakarta dengan menggunakan *Framework* COBIT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta berdasarkan penerapan teknologi informasi dengan melihat *maturity level* penggunaan IT mereka. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui sumbangan penerapan teknologi informasi, serta untuk mengetahui evaluasi penerapan teknologi informasi pada perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta.

Penelitian tentang penggunaan COBIT untuk mengaudit sistem informasi di dunia pendidikan juga dilakukan oleh Suryani (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk domain PO (*Plan and Organization*) dan AI (*Acquisition and Implementation*) pada COBIT 4.0, *IT maturity level* institusi berada diantara tingkat *initial* dan *repetable*, dengan skor rata-rata proses sebesar 1.68. Secara umum, untuk mencapai tingkat yang lebih baik organisasi perlu

mendefinisikan (secara formal) dan mensosialisasikan kebijakan, prosedur serta standar yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi; mengelola dokumen pengoperasian setiap proses layanan IT; menjalankan fungsi pengawasan, pelaporan dan evaluasi proses, serta memfasilitasi *knowledge sharing* antar individu penanggung jawab proses sehingga diharapkan ketergantungan sistem IT terhadap individu dapat diperkecil.

Penelitian tentang penggunaan *framework* COBIT *Quickstart* dilakukan oleh Volders (2005), yang mengungkapkan kasus praktis tata kelola IT dengan menggunakan *framework* COBIT *Quickstart*. Tahap-tahap yang dilakukannya adalah: 1) Penilaian COBIT *Quickstart*, 2) Mempresentasikan dan memutuskan prioritas, 3) Menyusun komite pengarah IT perusahaan 4) Pengembangan prosedur pengadaan untuk operasional dari tim proyek, 5) Pemodelan proses bisnis (Volders, 2005).

Lebih lanjut dikemukakan Volders (2005) bahwa seperti yang telah direkomendasikan dalam panduan *Quickstart*, penilaian dilakukan dengan cara diskusi dengan *Chief Information Officer* (CIO), yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Evaluasi *Quickstart* dilakukan melalui wawancara dengan tim manajemen IT. Hasilnya didokumentasikan dalam bentuk evaluasi *Quickstart*, di mana tingkat kematangan yang digunakan bukan tujuh tingkat yang dijelaskan dalam panduan ringkas, tetapi dengan lima tingkat, yaitu: level 0 (*ad hoc*), level 1 (*Initial*), level 2 (*Repetable*), level 3 (*Defined*), level 4 (*Managed*) dan level 5 (*optimised*) (Volders, 2005).

B. Landasan Teori

1. Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.

Sistem informasi (SI) atau *information system (IS)* merupakan penyelarasan dari orang, data, proses-proses, dan antar-muka yang berinteraksi mendukung dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari dalam suatu bisnis termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan manajemen dan para pengguna yang berpengalaman di bidangnya.

Teknologi informasi dalam pandangan sempit menjelaskan sisi teknologi dari sebuah teknologi informasi, seperti *hardware, software, database, networks*, dan peralatan lain. Dalam konsep yang lebih luas, teknologi informasi menjelaskan suatu koleksi teknologi informasi, pemakai, dan manajemen bagi keseluruhan organisasi. Teknologi informasi pada azasnya mencoba memanfaatkan isyarat, agar dapat dikembangkan cara-cara untuk memperluas jangkauan kemampuan otak manusia. Teknologi senantiasa terkait dengan penciptaan sesuatu yang sempurna (Setiawan, 2008). Pada hakekatnya teknologi informasi bukanlah bidang yang steril dari pengaruh bidang lain, tetapi teknologi

informasi merupakan alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan implikasi kinerja yang lebih baik pada teknologi informasi.

Menurut Turban (Sakam, M dan Surendro, 2005) sistem informasi adalah sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sedangkan menurut Jogiyanto (Wibowo, A., 2006), sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Adapun menurut Bodnar dan HopWood (Widyaningsih, 2009) Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Di dalam manajemen terdapat empat fungsi manajer yang juga merupakan suatu proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Agar proses-proses di atas dapat berlangsung maka dibutuhkan sistem informasi untuk mengalirkan informasi. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem informasi menjadi poros bagi proses-proses tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah sebuah sistem, yang dapat menerima, menyimpan,

mengolah dan mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Sistem Informasi Manajemen Sekolah

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi di Indonesia berjalan cukup pesat. Globalisasi yang diartikan suatu proses menyatunya dunia yang meliputi berbagai bidang tata kehidupan dunia mengandung karakteristik adanya perubahan keterbukaan, kreativitas, kecanggihan, kecepatan, keterikatan, keunggulan, kekuatan dan kompetisi bebas. Sebagai salah satu bidang yang mempersiapkan sumber daya manusia, dunia pendidikan dituntut untuk mengkonversikan *tacit knowledge* yang merupakan pengetahuan yang lahir berdasarkan pengalaman asli (*learn by experience*) dengan memasukkan elemen-elemen ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga menjadi *explicit knowledge* yang menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan *state of the art* mutakhir dan kompetitif (Setiawan, 2008).

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan bidang ilmu yang masih relatif baru. Awalnya SIM hanya merupakan bidang terapan yang mendapat perhatian para pelaku bisnis. Pada tahun 1960-an, para akademisi dari berbagai bidang ilmu, SIM mendapatkan kontribusi dari berbagai bidang ilmu yang lebih mapan, seperti Ilmu Komputer, Ilmu Teknik Elektro, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Ilmu Matematika dan Statistika, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, serta berbagai Ilmu Sosial lainnya seperti Psikologi, Budaya, Filsafat, dan bidang ilmu lainnya, mulai memperhatikan dan mengadakan kajian-kajian dan praktik dalam

bidang ini. Konsekuensi dari sebuah bidang ilmu yang relatif baru ialah para penelitiannya memiliki latar belakang non-SIM. Mereka cenderung memanfaatkan kaidah dan metoda sesuai bidang latar belakang yang mereka anut, serta mempertahankan warna bawaannya tersebut. Para akademisi berupaya untuk menyelesaikan permasalahan SIM dengan beraneka ragam kerangka acuan, sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing (Ibrahim, 2004).

Sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dari konsep sistem pengolahan data elektronik (*electronic data processing/EDP*), biasa juga disebut sebagai sistem pengolahan transaksi (*transactions processing system/TPS*), yang telah ditrapkan sejak tahun 1950-an pada organisasi bisnis. Mulai tahun 1960-an, dengan adanya pengaruh dari perkembangan teknologi dan cara penggunaan komputer, konsep SIM mulai diperkenalkan. Kalau konsep EDP terfokus pada data (transaksi) dengan penekanan lebih banyak ke masalah bagaimana mempercepat pengolahan data dan meningkatkan akurasi, maka konsep SIM fokus pada informasi dengan penekanan lebih banyak pada kualitas informasi. Pada perkembangan selanjutnya konsep SIM lebih disempurnakan dengan munculnya konsep-konsep baru, yaitu: sistem pendukung keputusan (*decision support system/DSS*), sistem otomatisasi perkantoran, sistem informasi eksekutif (*executive information system/EIS*), sistem ahli (*expert system*), sistem berbasis pengetahuan, serta sistem komunikasi dan kolaborasi (Sulaimana, 2011).

Pada jenjang satuan pendidikan (sekolah/madrasah) berkembang istilah sistem informasi manajemen sekolah (*school management information system/SMIS*) yang terkadang disebut sebagai sistem informasi sekolah (*school*

information system/SIS). Adapun yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen pendidikan, yakni: sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengolah data, yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, dan yang menyaring, mengatur, dan memilih data serta menyajikannya sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan/sekolah, terutama bagi para manajer pendidikan pada semua level dan fungsi organisasi, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk di dalamnya kegiatan instruksional. (Ibrahim, 2004).

Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah juga mengalami perubahan mendasar dengan munculnya gagasan penerapan pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dianggap sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah (Depdiknas, 2007). Pendekatan ini memberi peran yang lebih luas kepada sekolah. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah sehingga manajemen sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Untuk itu, MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan) dalam rangka peningkatan mutu.

Dengan meningkatnya peran sekolah dalam mengelola rumah tangga sendiri (MBS), maka diperlukan sistem informasi yang baik untuk membantu

mengelola lembaga tersebut. Dengan adanya sistem informasi sekolah, diharapkan pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan transparan, bersih dan akuntabel. Pada kenyataannya sudah banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia, baik SMP maupun SMA/SMK yang menggunakan sistem informasi ini.

Penerapan sistem informasi di sebuah lembaga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Penerapan sistem informasi juga harus direncanakan dengan baik, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada lembaga tersebut. Dengan demikian, penerapan sistem informasi tidak hanya mengikuti *tren*, tetapi memang diperlukan untuk membantu proses bisnis lembaga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan implementasi sistem informasi bagi sebuah lembaga, Gunawan (2010) menyampaikan beberapa pandangannya tentang kunci sukses implementasi sistem informasi, yang terletak pada beberapa faktor utama, antara lain:

- 1) Menginformasikan dan mengkomunikasikan perlunya perubahan dengan menyentuh aspek rasional maupun emosional.
- 2) Memonitor perkembangan implementasi sistem informasi secara keseluruhan termasuk infrastruktur jaringan.
- 3) Memperbaiki secara terus-menerus (*fine turning*) spesifikasi kebutuhan dan diagram proses untuk memastikan bahwa kebutuhan pemakai sudah tercakup.
- 4) Workshop untuk melihat perkembangan dari sistem yang dibuat dan melihat *prototype* sistem sehingga jika ada yang tidak sesuai bisa segera diketahui.
- 5) Mengevaluasi modul-modul yang selesai dibuat untuk mengetahui apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

- 6) Mendayagunakan sumber daya manusia di dalam organisasi agar masing-masing dari mereka mampu untuk melaksanakan proses perubahan untuk mendukung implementasi sistem informasi dengan cara pelatihan, workshop untuk meningkatkan kompetensi.

c. Kendala dan Hambatan Pencapaian Teknologi Informasi

Syamsul Mu'arif (Rahmawati, 2010) yang menyatakan bahwa terdapat lima hal yang menghambat perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, yaitu undang-undang, infrastruktur, sumber daya manusia, dana, dan budaya. Sedangkan di dalam *Blue Print* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional (Prakosa dan January, 2005), dinyatakan adanya 6 (enam) jenis kendala yang dihadapi saat ini dalam proses pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) Kendala dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
- 2) Kendala pendanaan dan kesinambungan program.
- 3) Kendala implementasi program.
- 4) Kendala ketersediaan teknologi infrastruktur dan konektivitas.
- 5) Kendala pengembangan lokal konten.
- 6) Kendala peningkatan sumber daya manusia berbasis TIK.

Terkait dengan masalah dukungan dan kebijakan pemerintah, hampir seluruh program pengembangan teknologi informasi diwujudkan dalam bentuk bantuan (*block grant*) dana dalam jumlah yang terbatas (Prakosa dan January, 2005). Peran pemerintah daerah dalam mendukung program pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi masih dinilai kurang. Hal ini selain disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran (*awareness*) dari pengambil kebijakan di pemerintahan daerah, juga disebabkan karena tidak adanya tim kerja yang dibentuk di tingkat pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten) untuk mengelola program-program teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan kendala pendanaan dan kesinambungan program Prakosa dan January (2005) menyatakan bahwa alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan termasuk dalam hal ini adalah pengembangan TIK sangatlah terbatas. Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional dalam mengembangkan program TIK selama ini mencrapkan mekanisme imbal swadaya (*Block Grand*) yang diberikan langsung secara terbatas ke beberapa sekolah kejuruan sebagai pelaksananya. Dana tersebut oleh sekolah digunakan untuk melaksanakan program yang kegiatannya antara lain: pembelian hardware/software, menyiapkan personil, melaksanakan pelatihan/workshop, perawatan dan pengoperasian peralatan/sistem. Imbal swadaya tersebut sifatnya hanya bantuan awal dari pengembangan program-program TIK Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya untuk operasional, perawatan dan pengembangan selanjutnya diharapkan pihak sekolah dan pemerintah daerah dapat meneruskannya secara mandiri. Karena dengan adanya otonomi daerah di Indonesia saat ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan mereka sebagai sumber dana pengembangan TIK pendidikan lebih lanjut di daerah masing-masing. Namun sayangnya hal ini belum bisa diwujudkan dengan baik karena kurangnya dukungan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Di samping hal tersebut di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai untuk dunia pendidikan, meliputi: 1) Infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. 2) Biaya akses koneksi Internet yang ada di Indonesia menjadi kendala besar bagi sebagian besar sekolah karena masih dirasakan mahal. 3) Ketersediaan perangkat komputer di berbagai sekolah di Indonesia juga belum merata dan memadai. Padahal ketersediaan perangkat komputer merupakan salah satu syarat utama bagi awal pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah (Prakosa dan January, 2005).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut, Wahid (2004) menyatakan adanya beberapa hambatan dalam pengembangan teknologi informasi, antara lain: *Pertama*, dana menjadi hambatan dalam penggunaan TI yang membutuhkan investasi yang sangat besar. Perencanaan arsitektur TI yang baik dengan mempertimbangkan kapasitas pendanaan menjadi sangat diperlukan. Kerjasama dengan pihak lain melalui *outsourcing* juga merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Pimpinan lembaga dalam konteks ini harus menyadari bahwa *fokus* penggunaan teknologi informasi dalam tahapan ini tidak untuk efisiensi tetapi untuk efektivitas. Manfaat TI dalam efisiensi akan terlihat pada masa yang akan datang setelah disertai dengan perubahan-perubahan mendasar lain dalam organisasi. Dalam kaitan ini, dukungan penuh dari manajemen puncak sangat diperlukan, baik dalam penyediaan dana maupun dalam kepemimpinan (*leadership*).

Kedua, kurangnya komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak akan menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sikap “*do it to me*” adalah salah satu bentuk kurangnya komitmen. Dalam banyak studi tentang pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen puncak selalu menjadi kondisi penentu keberhasilan.

Ketiga, kekhawatiran terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang lain. Dalam banyak studi ditemukan, *resistance to change* adalah salah satu penghambat perubahan. Ada banyak alasan mengapa seseorang menjadi khawatir dengan perubahan, termasuk hilangnya rasa aman dan *entry barrier* yang besar terkait dengan tingkat ketrampilan. Dalam konteks ini, motivasi juga menjadi isu penting. Dalam banyak kasus perubahan perusahaan, sistem penghargaan (*rewarding system*) juga diperbaiki untuk memotivasi keterlibatan semua *stakeholder*.

Keempat, keterlibatan semua *stakeholder*. Tidak pernah ada perubahan yang mendasar tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam hal ini, selain *rewarding system* yang baik, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan. Pelibatan semua *stakeholder* bukan masalah mudah dalam hal ini. Tingkat kapabilitas dan kepedulian yang berbeda menjadikan pelibatan semua pihak di lembaga menjadi sangat berat. Keterlibatan semua pihak tidak hanya pada tahap awal implementasi, namun sampai proses pemanfaatan teknologi informasi secara terus-menerus. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan perubahan budaya kerja, yaitu menjadi budaya digital. Tanpa keterlibatan semua pihak dan perubahan budaya, manfaat TI tidak dapat dirasakan dengan optimal.

2. PAS (Paket Aplikasi Sekolah)

PAS (Paket Aplikasi Sekolah) merupakan aplikasi sistem informasi manajemen sekolah yang didesain dan dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional, diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. PAS merupakan piranti lunak sistem informasi manajemen pendidikan Menengah untuk tingkat sekolah, yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk dijalankan di setiap Sekolah Menengah yang ada di Indonesia (Depdiknas, 2007). Aplikasi ini akan bisa membantu pengelolaan sekolah, baik yang berhubungan dengan karyawan, keuangan, kesiswaan, kurikulum, dan sebagainya.

PAS dibangun dengan dana yang sepenuhnya dari pemerintah (APBN), melalui Direktorat Pembinaan SMP dan Direktorat Pembinaan SMA. Oleh karena itu legalitas PAS, adalah milik negara yang tidak diperdagangkan (Depdiknas, 2007). Akan tetapi, oleh karena PAS ini dibangun dan dikembangkan untuk digunakan sekolah-sekolah seluruh Indonesia, maka penggandaan dan penyebar luasannya ke SMP dan SMA merupakan tindakan legal, bahkan dianjurkan.

Sebagai sistem informasi, yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka PAS ini memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

- a. Sederhana, artinya bahwa untuk mengaplikasikan PAS tidak diperlukan perangkat keras komputer dengan spesifikasi yang tinggi.
- b. Fleksibel, dalam artinya bahwa aplikasi ini dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut dan mandiri, berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah.

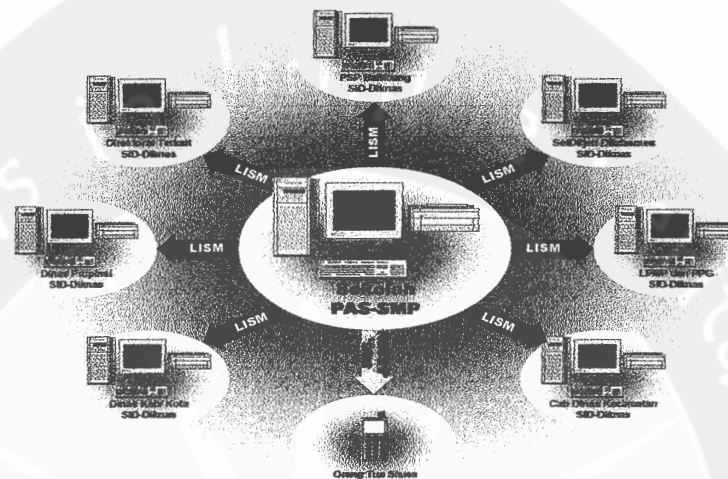
- c. Terpadu, maksudnya adalah bahwa paket ini terdiri dari beberapa modul, namun demikian antara modul yang satu dengan modul yang lainnya merupakan bagian integral dari sistem informasi pendidikan nasional (Depdiknas, 2007).

Adapun manfaat PAS adalah membantu administrasi sekolah dalam hal pendataan, pelaporan dan pelayanan data dan informasi tentang sekolah yang bersangkutan kepada pihak luar yang membutuhkannya (Depdiknas, 2007). Berkaitan dengan masalah pendataan, PAS dapat melakukan pendataan dan perekaman data tentang: 1) identitas sekolah; 2) penerimaan peserta didik baru; 3) data induk siswa, guru dan tenaga administratif; 4) kegiatan belajar mengajar, seperti wali kelas, penugasan guru pada mata pelajaran, jadwal dan absensi siswa; 5) kebutuhan guru; 6) keuangan sekolah; 7) fasilitas sekolah, seperti perpustakaan, alat peraga pendidikan, ruang kelas, dan sarana pembelajaran yang lainnya; 8) bantuan-bantuan yang pernah diterima baik dari pemerintah maupun institusi lainnya (Depdiknas, 2007).

Berkaitan dengan masalah pelaporan, maka kebutuhan sekolah akan data dan informasi mengenai pendidikan yang diselenggarakannya dengan mudah dan cepat dapat dipenuhi. Output dalam bentuk laporan yang dapat dihasilkan oleh PAS, antara lain: daftar siswa, daftar guru, daftar wali kelas, jadwal pelajaran, absensi siswa, raport siswa, dan sebagainya. PAS juga dapat memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait, mulai Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat terkait, Balitbang Depdiknas, Sekretariat Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional,

LPMP dan PPG (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Pendidikan Profesi Guru), seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1:
Delapan Sasaran Penyampaian Data/Informasi PAS di Luar Sekolah



Sumber : Depdiknas, 2007

Adapun mengenai pengiriman data, dengan menggunakan PAS akan didapatkan efisiensi yang sangat besar. Sebelum menggunakan PAS setiap sekolah harus secara rutin mengisi empat rangkap instrumen yang kemudian harus didistribusikan ke Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dengan menggunakan PAS maka sekolah tidak perlu lagi harus mengisi instrumen dengan jumlah halaman yang banyak dan berangkap, karena informasi yang diperlukan dapat didistribusikan kapan saja secara otomatis.

3. COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*)

a. Pengertian

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk *IT Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (*user*), dan manajemen,

untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah teknis IT (Sasongko, 2009). COBIT mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, resiko IT dikelola secara tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab (Tanuwijaya dan Sarno, 2010).

COBIT menggunakan enam standar teknologi informasi global yang digunakan sebagai sumber utama agar memastikan ruang lingkup, konsistensi, dan kesejajaran di dalam pengembangan teknologi informasi. Keenam standar teknologi informasi ini adalah (Setiawan, 2008):

- a. *Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO): Internal Control-Integrated Framework, 1994 Enterprise Risk Management-Integrated Framework, 2004.*
- b. *Office of Government Commerce (OGC®): Information Technology Infrastructure Library® (ITIL®), 1999-2004.*
- c. *International Organisation for Standardisation: ISO/IEC 17799:2005, Code of Practice for Information Security Management.*
- d. *Software Engineering Institute (SEI®): SEI Capability Maturity Model (CMM®), 1993SEI Capability Maturity Model Integration (CMMI®), 2000.*
- e. *Project Management Institute (PMI®): Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), 2000.*
- f. *Information Security Forum (ISF): The Standard of Good Practice for Information Security, 2003.*

COBIT didasari oleh analisis dan harmonisasi dari standar teknologi informasi dan *best practices* yang ada, serta sesuai dengan prinsip *governance* yang diterima secara umum. COBIT berada pada level atas, yang dikendalikan oleh kebutuhan bisnis, yang mencakupi seluruh aktifitas teknologi informasi, dan mengutamakan pada apa yang seharusnya dicapai dari pada bagaimana untuk mencapai tatakelola, manajemen dan kontrol yang efektif. COBIT *Framework* bergerak sebagai integrator dari praktik *IT governance* dan juga yang dipertimbangkan kepada petinggi manajemen atau manager; manajemen teknologi informasi dan bisnis; para ahli *governance*, asuransi dan keamanan; dan juga para ahli auditor teknologi informasi dan kontrol. COBIT *Framework* dibentuk agar dapat berjalan berdampingan dengan standar dan *best practices* yang lainnya (Setiawan, 2008).

Implementasi dari *best practices* harus konsisten dengan tatakelola dan kerangka kontrol organisasi, dan terintegrasi dengan metode lain yang digunakan. Standar dan *best practices* bukan merupakan solusi yang selalu berhasil dan efektifitasnya tergantung dari bagaimana mereka diimplementasikan dan tetap diperbaharui. *Best practices* biasanya lebih berguna jika diterapkan sebagai kumpulan pinsip dan sebagai permulaan (*starting point*) dalam menentukan prosedur. Untuk mencapai keselarasan dari *best practices* terhadap kebutuhan bisnis, sangat disarankan agar menggunakan COBIT pada tingkatan teratas (*highest level*), menyediakan kontrol *framework* berdasarkan model proses teknologi informasi yang seharusnya cocok untuk organisasi secara umum (Setiawan, 2008).



Prinsip yang mendasari *COBIT Framework* adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Organisasi perlu mengelola dan mengontrol sumber teknologi informasi (*IT resource*) dengan menggunakan kumpulan proses untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Untuk sebagian besar institusi, informasi dan teknologi yang mendukung kegiatan organisasi merupakan aset yang berharga (Setiawan, 2008).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan COBIT, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas IT
- 2) Membantu IT memahami kebutuhan bisnis
- 3) Menempatkan praktik di tempat untuk memenuhi kebutuhan bisnis seefisien mungkin.
- 4) Membantu para eksekutif memahami dan mengelola investasi IT sepanjang siklus hidup mereka.
- 5) Memberikan suatu metode untuk menilai apakah layanan IT dan inisiatif baru relevan dengan persyaratan bisnis dan cenderung untuk memberikan manfaat yang diharapkan.
- 6) Membantu untuk mengembangkan dan mendokumentasikan struktur organisasi yang tepat, proses dan alat untuk manajemen IT yang efektif.

b. Framework COBIT

COBIT membagi tahapan pengelolaan IT ke dalam 4 domain (*COBIT Framework*) yaitu *Planning and Organisation, Acquisition & Implementation,*

Delivery & Support, dan Monitoring and Evaluation (Bowen, Paul L, dkk, 2007; Naser Eslami, dkk, 2008; Sarno dan Anisah, 2010; Musa, Ahmad, 2009, Suryani, 2009). COBIT mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi 34 proses yang terbagi ke dalam empat buah domain proses tersebut, meliputi:

1. *Planning & Organisation*. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyesuaian strategi TI dengan strategi perusahaan, mencakup masalah strategi, taktik dan identifikasi cara terbaik IT untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi.

Domain ini mencakup:

- 1) PO1 – Menentukan Rencana Strategis
- 2) PO2 – Menentukan Arsitektur Informasi
- 3) PO3 – Menentukan arah teknologi
- 4) PO4 – Menentukan proses IT, organisasi dan hubungannya
- 5) PO5 – Mengelola Investasi IT
- 6) PO6 – Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen
- 7) PO7 – Mengelola Sumberdaya Manusia
- 8) PO8 – Mengelola Kualitas
- 9) PO9 – Menilai dan Mengelola Resiko IT
- 10) PO10 – Mengelola Proyek

2. *Acquisition & Implementation*. Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integrasinya dalam proses bisnis organisasi, juga meliputi perubahan dan perawatan yang dibutuhkan sistem yang sedang berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap terjaga. Domain ini meliputi:

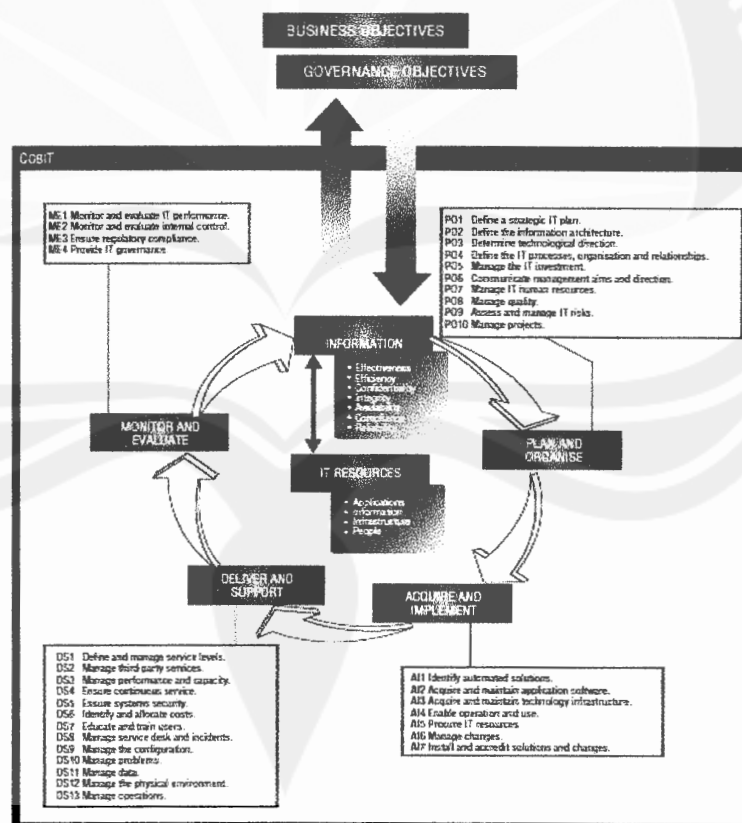
- 11) AI1 – Mengidentifikasi solusi yang dapat diotomatisasi.
 - 12) AI2 – Mendapatkan dan Memelihara Software Aplikasi.
 - 13) AI3 – Mendapatkan dan Memelihara infrastruktur teknologi
 - 14) AI4 – Mengaktifkan operasi dan penggunaan
 - 15) AI5 – Menyediakan sumber daya IT.
 - 16) AI6 – Mengelola perubahan
 - 17) AI7 – Instalasi dan akreditasi solusi dan perubahan.
3. *Delivery & Support*. Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinuitas layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan. Domain ini meliputi:
- 18) DS1 – Menentukan dan mengelola tingkat layanan.
 - 19) DS2 – Mengelola layanan dari pihak ketiga
 - 20) DS3 – Mengelola performa dan kapasitas.
 - 21) DS4 – Menjamin layanan yang berkelanjutan
 - 22) DS5 – Menjamin keamanan sistem.
 - 23) DS6 – Mengidentifikasi dan mengalokasikan dana.
 - 24) DS7 – Mendidikan melatih pengguna
 - 25) DS8 – Mengelola service desk dan insiden.
 - 26) DS9 – Mengelola konfigurasi.
 - 27) DS10 – Mengelola Permasalahan.
 - 28) DS11 – Mengelola data
 - 29) DS12 – Mengelola lingkungan fisik
 - 30) DS13 – Mengelola operasi.

4. *Monitoring and Evaluation*. Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern dan jaminan independent dari proses pemeriksaan yang dilakukan. Domain ini meliputi:

- 31) ME1 – Mengawasi dan mengevaluasi performansi IT.
- 32) ME2 – Mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal
- 33) ME3 – Menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal.
- 34) ME4 – Menyediakan (provide) IT Governance.

Seluruh tahapan COBIT yang terbagi dalam 4 domain dan 34 proses (Cobit Framework) tersebut, ditunjukkan pada Gambar 2.2, sebagai berikut:

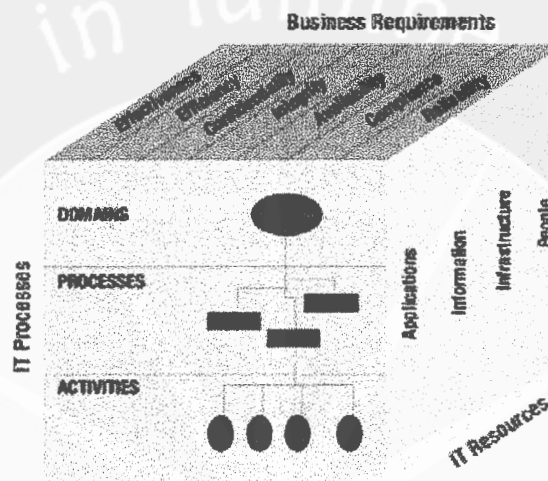
Gambar 2.2. Cobit Framework



(Sumber: IT Governance Institute, 2007)

Secara keseluruhan konsep *framework* COBIT digambarkan sebagai sebuah kubus tiga dimensi yang terdiri dari: (1) kebutuhan bisnis, (2) sumber daya teknologi informasi dan (3) proses teknologi informasi, sebagaimana terlihat pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Kerja COBIT



(Sumber: *IT Governance Institute, 2007*)

Kendali (Control) didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan bisnis akan dapat dicapai dan kejadian yang tidak diinginkan dapat diperkecil kemungkinan terjadinya (Suryani, 2009). Dalam melakukan pengukuran terhadap performansi proses IT, COBIT menggunakan dua macam pengukuran :

1. Key Goal Indicator (KGI), merupakan pengukuran yang mengindikasikan apakah suatu proses IT telah memenuhi requirement bisnis yang diinginkan pihak manajemen.
2. Key Performance Indicator (KPI), merupakan pengukuran yang menentukan seberapa baik performansi dari proses IT dalam rangka mendukung

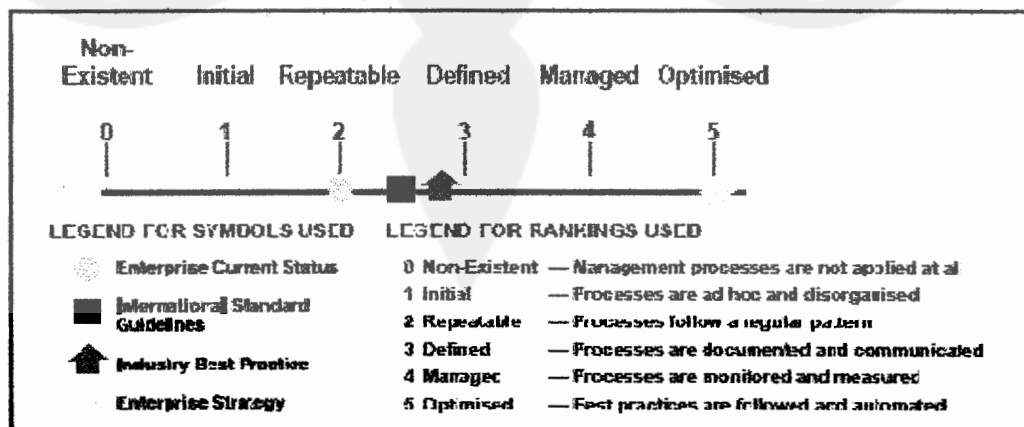
tercapainya tujuan IT. KPI akan memberikan gambaran apakah suatu tujuan akan mungkin tercapai atau tidak (Suryani, 2009).

c. COBIT Maturity Model

COBIT menyediakan parameter untuk penilaian setinggi dan sebaik apa pengelolaan IT pada suatu organisasi dengan menggunakan *maturity models* yang bisa digunakan untuk penilaian kesadaran pengelolaan (*management awareness*) dan tingkat kematangan (*maturity level*). COBIT mempunyai model kematangan (*maturity models*) untuk mengontrol proses-proses IT dengan menggunakan metode penilaian (*scoring*) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses IT yang dimilikinya dari skala *nonexistent* sampai dengan *optimised* (dari 0 sampai 5), yaitu: 0: *Non Existent*, 1: *Initial*, 2: *Repeatable*, 3: *Defined*, 4: *Managed* dan 5: *Optimized* (Purwanto dan Saufiah, 2010; Setiawan, 2008; Nurlina dan Cory, 2008).

Model kematangan (*maturity models*) tersebut seperti terlihat dalam Gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4: Maturity Model



(Sumber: IT Governance Institute, 2007)

Adapun diskripsi tentang *maturity level* yang menggambarkan Tingkat Kedewasaan Umum dalam COBIT sebagaimana dituangkan dalam COBIT 4.1 (IT Governance Institute, 2007) seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Maturity Model

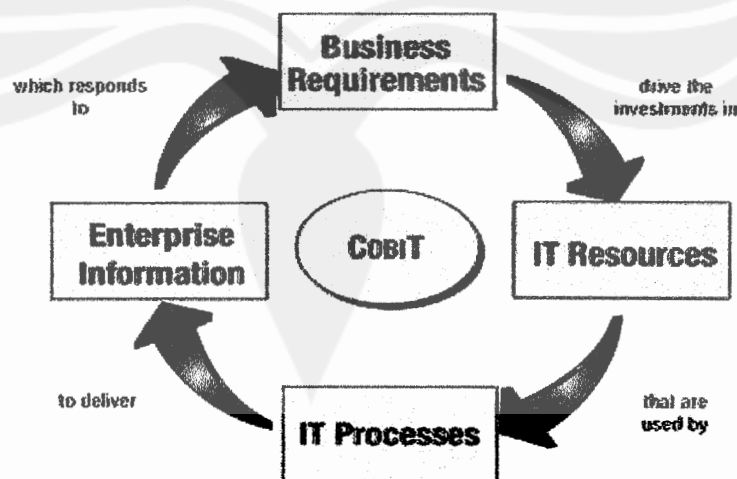
Level	Kriteria Kedewasaan
0 Non Existent	Sama sekali tidak ada proses TI yang diidentifikasi. Perusahaan belum menyadari adanya isu yang harus dibahas.
1 Initial / Ad Hoc	Tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan <i>ad hoc</i> yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Pendekatan manajemen secara keseluruhan masih belum terorganisasi.
2 Repeatable but Intuitive	Proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur yang serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau pengkomunikasian prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi error sangat besar.
3 Defined	Prosedur distandarisasi dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Kemudian diamanatkan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti. Namun penyimpangan tidak mungkin dapat terdeteksi. Prosedur sendiri tidak lengkap namun sudah memformalkan praktek yang berjalan.
4 Managed and measurable	Manajemen mengawasi dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berada dibawah peningkatan yang konstan dan penyediaan praktek yang baik. Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu.
5 Optimised	Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik, berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk peningkatan kualitas dan efektifitas serta membuat perusahaan cepat beradaptasi.

(Sumber: IT Governance Institute, 2007)

Keberhasilan implementasi teknologi informasi di dalam mendukung kebutuhan bisnis membuat manajemen harus dapat menempatkan sistem kendali internal atau *framework* pada tempatnya. COBIT *Framework* memberikan kontribusi terhadap kebutuhan tersebut dengan membuat hubungan dengan kebutuhan bisnis, mengorganisasi aktifitas teknologi informasi ke dalam proses model yang diterima secara umum, mengidentifikasi sumber teknologi informasi utama, mendefinisikan sasaran kontrol manajemen yang harus dipertimbangkan. Konsep arsitektur teknologi informasi dapat membantu untuk mengidentifikasi sumber yang diperlukan agar proses teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendukung kesuksesan Implementasi Teknologi Informasi, *Information Technology Governance Institute* (ITGI) telah melakukan publikasi COBIT (versi 4.1). Gambar 3 adalah merupakan *Framework Information Technology Control Objectives*.

Gambar 2.5. Framework IT Control Objectives



(Sumber: IT Governance Institute, 2007)

d. Tahapan

Adapun tahapan penerapan IT Governance dengan menggunakan Cobit adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Needs

- a. Memahami latar belakang inisiatif tata kelola dan menyusun tujuan bisnis untuk proyek tata kelola IT, meningkatkan kesadaran, dan mendefinisikan pengorganisasian proyek dengan tepat.
- b. Memahami tujuan bisnis dan bagaimana tujuan bisnis tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan IT.
- c. Memahami resiko potensial dan bagaimana resiko-resiko tersebut dapat mempengaruhi tujuan IT.
- d. Menentukan lingkup proyek perbaikan dan mengidentifikasi proses-proses IT yang akan diterapkan atau ditingkatkan.

2. Envisioning Solution

- a. Mendefinisikan di mana status perusahaan saat ini (as-is) dan menilai kemampuan dan kematangan proses-proses pada saat ini.
- b. Menetapkan target dari tingkatan kematangan (to-be) dan kemampuan yang resonable dan sesuai untuk masing-masing proses IT.
- c. Menganalisis dan menterjemahkan gap antara as-is dan to-be ke dalam peluang-peluang untuk melakukan peningkatan.

3. Plan Solution

- a. Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif peningkatan dan menterjemahkannya ke dalam proyek yang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi tujuan bisnis dan mengurangi resiko.

- b. Mengintegrasikan proyek tersebut dalam satu strategi peningkatan dan rencana program yang terperinci dan mudah dilaksanakan untuk menjalankan solusi.

4. *Implement solution*

- a. Pada saat rencana peningkatan dijalankan, pelaksanaan rencana diatur oleh proyek yang dibentuk dan metodologi management perubahan.
- b. Kelangsungan atas penyampaian hasil bisnis yang diinginkan oleh umpan balik dan pembelajaran yang diperoleh dengan mereview pasca implementasi.
- c. Monitoring peningkatan kinerja perusahaan.

e. **COBIT *Quickstart***

COBIT adalah seperangkat sumber daya yang berisi informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk mengadopsi tata kelola dan kerangka kontrol TI, namun luas dan kedalaman dari panduan yang diberikan oleh semua sumber daya COBIT mungkin terlalu rinci untuk organisasi yang kecil. Untuk organisasi yang lebih besar, COBIT mungkin memerlukan terlalu banyak waktu untuk menganalisis untuk mengambil langkah pertama menuju tata kelola TI (IT Goverment Institute, 2007).

COBIT *Quickstart* didasarkan pada pilihan tujuan proses dan kontrol COBIT 4.1. Hasilnya adalah versi sederhana yang mencakup seperangkat proses-proses dan praktek manajemen yang terbatas. *Quickstart* juga menyediakan versi sederhana dari *Responsible, Accountable, Consulted* dan *Informed* (RACI).

Perusahaan dapat menggunakannya sebagai baseline tanpa modifikasi, atau menggunakannya sebagai titik awal untuk membangun praktik manajemen dan teknik pengukuran yang lebih rinci (IT Government Institute, 2007).

Perbandingan COBIT 4.1 dan COBIT *Quickstart* seperti terlihat pada gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6: Perbandingan COBIT 4.1 dan COBIT *Quickstart*

	CoBIT	Quickstart
Domains	4	4
Processes	34	32
Control Objectives	210	59

(Sumber: IT Governance Institute, 2007)

Pilihan bahan COBIT dibuat menggunakan filosofi yang sama seperti yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan Tata Kelola TI, yaitu analisis *top-down* dan analisa risiko yang dimulai dengan merumuskan tujuan bisnis, kemudian dukungan dari tujuan TI. Hal tersebut juga didorong oleh asumsi berikut:

1. Infrastruktur IT tidak rumit.
2. Tugas yang lebih kompleks adalah outsourcing.
3. Tujuan kurang membangun lebih baik membeli.
4. Keterbatasan dalam menempatkan ketrampilan IT.
5. Toleransi risiko relatif tinggi.
6. Perusahaan sangat sadar biaya.
7. Struktur perintah sederhana di tempat.
8. Terdapat kontrol jangka pendek. (IT Government Institute, 2007)

Sejalan dengan publikasi COBIT 4.1 kontrol penuh, proses yang komprehensif dan aplikasi kontrol tidak dibahas secara rinci isi COBIT *Quickstart*, namun kontrol tersebut harus dipertimbangkan ketika menerapkan *Quickstart*, seperti yang diperlukan oleh manajemen untuk memiliki pandangan yang lengkap dari semua persyaratan bisnis kendali perusahaan.

COBIT *Quickstart* baseline terdiri dari 32 halaman dokumen menyediakan proses, tujuan pengendalian, grafik RACI dan metrik kunci, disajikan dalam tampilan yang mudah dibaca, bahasa tabular dan non-teknis, untuk mendorong adopsi yang cepat dan mengurangi perdebatan dan diskusi. Karena dasar, *Quickstart* pada umumnya dianggap rasional mengelola dan mengendalikan secara minimum. Dalam perspektif manajemen atas, *Quickstart* membantu organisasi memfokuskan sumber daya yang terbatas.

Refleksi pertama ketika mempertimbangkan *Quickstart* adalah untuk memutuskan apakah itu cocok untuk organisasi tertentu. *Quickstart* membantu perusahaan untuk membuat keputusan ini untuk memasukkan alat-alat yang memungkinkan organisasi untuk melaksanakan penilaian dan faktor-faktor manajemen yang berkaitan dengan kompleksitas TI. Untuk organisasi besar, harus diakui bahwa *Quickstart* hanya dapat menjadi titik awal untuk bergerak menuju kerangka tata kelola TI yang lebih luas.

COBIT *Quickstart* menyediakan dasar untuk kontrol atas IT dan atau titik awal untuk menerapkan IT governance lebih luas. Setiap organisasi pelaksana COBIT *Quickstart* bisa mulai membangun pada awal, tetapi juga harus selalu menganalisa bagaimana tujuan bisnis organisationspecific keras TI tujuan, pada

gilirannya, mendorong IT tujuan proses. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi ekstensi potensial untuk dasar yang diperlukan oleh bisnis organisasi dan tujuan tata kelola IT (IT Governance Institute, 2007).

IT Governance Institute menulis bahwa ada dua pendekatan disarankan untuk bergerak ke arah pelaksanaan COBIT *Quickstart* lebih luas yaitu:

1. Membuat *cross-references*: *Quickstart* memberikan gambaran lengkap dari referensi silang lengkap untuk COBIT. Jika mendefinisikan kelemahan dalam bidang tertentu, lintas-referensi dapat memberikan panduan untuk daftar yang lebih luas tujuan pengendalian dalam domain tertentu. Berdasarkan risiko organisasi dan driver nilai, Anda dapat memilih tujuan pengendalian tambahan dan situasi, adalah bahwa seperti yang akan dianalisa dan diterjemahkan ke dalam program peningkatan.
2. Rencana implementasi lengkap dari manajemen TI, ikuti petunjuk dalam Panduan *Deployment* untuk IT, program Tata kelola edisi ke-2 dan berencana untuk mulai menerapkan tata kelola IT menggunakan COBIT. (IT Governance Institute, 2007).

Quickstart ditujukan untuk organisasi kecil dan menengah, namun, juga cocok untuk organisasi dengan lingkungan pengendalian yang tepat, yang dianggap menjadi salah satu yang telah:

- a. Menyederhanakan struktur komando.
- b. Mempersingkat jalur komunikasi.
- c. Membatasi rentang kendali.
- d. Tidak banyak pemisahan tanggung jawab.

Evaluasi *Quickstart* dilakukan melalui wawancara dengan tim manajemen IT. Hasilnya didokumentasikan dalam bentuk evaluasi *Quickstart*, di mana tingkat kematangan yang digunakan, bukan tujuh tingkat seperti yang dijelaskan dalam Panduan Ringkas (Volders, 2005).

Meskipun *Quickstart* digunakan dalam berbagai cara, tergantung pada topik, proses terstruktur memenuhi kebutuhan implementasi lengkap dari sebuah program untuk meningkatkan tata kelola TI, seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Langkah-Langkah Proses COBIT *Quickstart*

Langkah Proses	Diskripsi proses	Penyampaian
Menilai kesesuaian	Menerapkan instrumen penilaian sesuai yang disediakan dalam <i>Quickstart</i> untuk menentukan apakah organisasi tersebut cocok untuk menggunakan <i>Quickstart</i> . Hasilnya akan menunjukkan apakah program ini dapat digunakan atau dilengkapi dengan beberapa komponen yang lebih rinci dibandingkan dengan COBIT penuh, atau COBIT penuh harus diterapkan dari awal.	Keputusan tentang penggunaan COBIT <i>Quickstart</i>
Mengevaluasi kondisi saat ini	Kegiatan utama dalam tahap ini adalah pengumpulan data, wawancara dengan personel kunci yang bertanggung jawab untuk proses ini dan meninjau hasil kinerja dan laporan audit. Atau tim personil yang berkualitas dapat berkumpul untuk bekerja dengan fasilitator untuk mempercepat proses.	Proses posisi saat ini
Menentukan keadaan target	Memeriksa lingkungan untuk mengoperasikan bagan organisasi dan posisi masa depan pada tabel proses boot lebih cepat.	Proses posisi yang akan datang
Analisa kesenjangan	Memeriksa praktek-praktek pengendalian yang terkait dengan setiap proses kesenjangan (perbedaan antara apa yang dan menjadi posisi) untuk menentukan sifat dan besarnya perbaikan yang diperlukan.	Mendefinisikan proses perubahan

Langkah Proses	Diskripsi proses	Penyampaian
Mendefinisikan proyek-proyek perbaikan	Mengelompokkan persyaratan perubahan proses individu secara logis ke dalam proyek-proyek perbaikan yang memungkinkan organisasi untuk membuat kemajuan yang efektif dalam tahap dikelola	Proses perbaikan
Mengembangkan program implementasi tata kelola terintegrasi	Mengatur, memprioritaskan dan urutan proyek-proyek perbaikan ke dalam rencana program terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari organisasi, saling ketergantungan proyek dan ketersediaan sumber daya	Rencana program terpadu

(Sumber : IT Government Institute, 2007)

COBIT *Quickstart* menyediakan dasar untuk kontrol atas IT dan / atau titik awal untuk menerapkan IT governance lebih luas. Setiap organisasi pelaksana COBIT *Quickstart* bisa mulai membangun dari awal, tetapi juga harus selalu menganalisis bagaimana tujuan bisnis organisasi yang spesifik sejalan dengan tujuan IT, yang pada gilirannya dapat mendorong tujuan proses IT. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi ekstensi potensial untuk dasar yang diperlukan oleh organisasi bisnis dan tujuan tata kelola IT.